**Rapat Survei Kebutuhan SIM Bansos Pemkot Bogor**

Hari/ Tgl. : Jumat, 29 Nop 2013

Tempat : Ruang rapat DPKAD

Peserta : IPTEKnet (Adit, Novi, Mamung)

Bogor (Tini, Apoh, Tia...dkk)

Ibu Tini:

* SIM Keuangan berkaitan dengan Hibah Bansos di DPKAD;
* Kepeperluan penganggaran hibah bansos dengan data rinci terhadap penerima bansos ( angka ada dan data penerima hibah juga ada);
* Ada juga bansos yang tidak terencana (angka ada, tetapi daftar calon penerima bisa mendadak);
* Peraturan tentang Bansos di Kota Bogor 🡪 Perwali Nomor 10 2013;
* Bagian umum -> Walikota -> Kemasyarakatan -> SKPD (verifikasi proposal) -> Kemasyarakatan -> TAPD () -> Rancangan WAPPAS -> Pembahasan dengan DPRD -> RAPBD;
* Dana Hibah Bansos bisa murni maupun perubahan;
* Calon penerima tidak boleh 2 tahun berturut-turut, kecuali didasarkan undang-undang atau peraturan (contoh: KONI, Pramuka dll);
* Terdapat sekitar 500 proposal per tahun;
* Dalam proposal mencantumkan nama, alamat dll 🡪 bisa dimanipulasi;
* Permohonan dari masyarakat sangat banyak -> DPKAD mengalami kesulitan melakukan filtering proposal;
* Fitur
  + Pelacakan data calon penerima hibah (kemiripan) berdasar:
    - nama organisasi;
    - alamat;
    - kata kunci lain;
  + Kerjasamanya seperti apa? Kegiatan harus selesai tanggal 20 Des. 2013;
* cc

Apoh:

* Petunjuk pelaksanaan penyaluran dana Hibah Bansos;
* Didasar Perwali yag merefer ke Pemendagri Juklak pemberian bansos;
* Bansos terpisah dengan hibah: penganggaran, pelaksanaan, monev;
* Sistem diharapkan bisa membantu dalam ketiga tahap tersebut;
* Penganggaran:
  + Flowchart ada di buku;
* Pelaksanaan:
* Monev:

Pupung:

* Perencanaan:
  + Sistem hanya ada di Bag. Umum, Kemasyarakatan dan DPKAD;
  + Kemasyarakatan entri dan tentukan ke SKPD mana?;
  + Distribusi manual proposal ke SKPD;
  + SKPD membuat BA hasil evaluasi 🡪 kembalikan ke bag. Kemasyarakatan;
  + Bag. Kemasyarakatan entry hasil evaluasi (nomor BA, rupiah dll);
  + Bag. Kemasyarakatan cetak data calon penerima bansos/ hibah 🡪 kirim ke walikota;
  + Walikota 🡪 Kemasyarakatan untuk edit perbaikan;
  + DPKAD 🡪 cek ulang hasil pembahasan di TAPD;
  + DPKAD 🡪 cek dan entry hasil evaluasi dari TAPD (rupiah dll);
  + DPKAD 🡪 Draft RAPBD bansos dan hibah;
* Pelaksanaan:
  + Pencairan (tgl, keterangan)
* Monev:
  + Cek lapangan 🡪 status monev;
* m

Mamung:

* Siapa yang entry data proposal (Bid. Kemasyarakatan, SKPD, DPKAD)..??
* Apakah filrtering mulai dari SKPD?
* Format laporan seperti apa?
* Beda OPD dan SKPD? Apa itu TAPD?:
* Apa itu KUA dan PPAS;
* Upload file?
* Tracking, Kemiripan...
* Minta contoh proposal, BA, data penerima bansos dll;
* Organisasi (non reguler):
  + KONI
  + KPU
  + Pramuka
  + Panwaslu
  + Kodim
* s

Rina:

* Kebutuhan untuk export data ke SP2D
  + Nama Pemohon
  + Alamat
  + Nomor Telpon
  + Nomor & tanggal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) 🡪 SKPD
  + Rupiah
  + Nomor rekening bank
* Report utk PPK:
  + Nama Pemohon
  + Alamat
  + No & Tgl NPHD
  + No Rek
  + Pagu Anggaran
  + Realisasi
  + Nomor & tanggal SP2D
  + Tanggal cair
  + Leading sektor
* SPJ dari bendahara pengeluaran khusus

Karna:

* Hibah tidak boleh dua tahun berturut-turut. Bansos dimungkinkan berturut2 dua tahun;
* Boleh atau tidak boleh, indikatornya pencairan uang;